EVALUASI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

Alfascadieno Akbar Fatoni
NPP. 33.0838
Program Studi Keuangan Publik
Email: alfascadienoaf@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Komaedi, M.Si.
Email: komaedi65@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the need for transparent, accountable, efficient, and integrated regional financial management through the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD). Although SIPD has been designed as a national system to integrate the stages of regional financial management, its implementation at the provincial level still shows different levels of achievement, particularly in the implementation and financial administration processes. These differences are reflected in human resource readiness, infrastructure, user understanding, uniformity of workflows, and the uneven benefits of the system.* ***Purpose:*** *This study aims to evaluate the implementation and financial administration of regional finances through SIPD at the provincial level in Indonesia.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative approach using the CIPP evaluation model, which consists of the context, input, process, and product dimensions. Data were collected through semi-structured interviews, moderate participatory observation, and documentation. The study was conducted at the Directorate General of Regional Financial Development of the Ministry of Home Affairs by comparing data from West Java, Banten, and Jambi Provinces as regions with different SIPD performance categories.* ***Result:*** *The findings show that SIPD implementation has not been uniformly optimal. In the context dimension, SIPD policy is relevant to the needs of regional financial management but has not been translated consistently across regions. In the input dimension, differences remain in human resource readiness, infrastructure, and system support. In the process dimension, financial administration through SIPD has been implemented but has not been consistent across all provinces. In the product dimension, SIPD has provided benefits in supporting transparency, data integration, and accountability, although these benefits have not been evenly distributed.* ***Conclusion:*** *SIPD is an important instrument in regional financial management; however, the effectiveness of its implementation still depends on the readiness and consistency of regional governments in operationalizing the system.*

Keywords: *SIPD, regional financial administration, CIPP evaluation, regional financial management, provincial government.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun SIPD telah dirancang sebagai sistem nasional untuk mengintegrasikan tahapan

pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaannya pada tingkat provinsi masih menunjukkan perbedaan capaian, terutama dalam aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Perbedaan tersebut terlihat pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, pemahaman pengguna, keseragaman alur kerja, serta manfaat sistem yang belum dirasakan secara merata. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi di Indonesia. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP yang mencakup dimensi context, input, process, dan product. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif moderat, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan perbandingan data Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jambi sebagai daerah dengan kategori kinerja SIPD yang berbeda. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD belum optimal secara merata. Pada dimensi context, kebijakan SIPD relevan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah, tetapi belum diterjemahkan secara seragam. Pada dimensi input, masih terdapat perbedaan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan sistem. Pada dimensi process, pelaksanaan penatausahaan melalui SIPD telah berjalan, namun belum konsisten pada seluruh provinsi. Pada dimensi product, manfaat SIPD telah dirasakan dalam mendukung transparansi, integrasi data, dan akuntabilitas, tetapi belum merata. **Kesimpulan:** SIPD merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, namun efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan dan konsistensi pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan sistem.

Kata kunci: SIPD, penatausahaan keuangan daerah, evaluasi CIPP, pengelolaan keuangan daerah, pemerintah provinsi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menuntut setiap proses administrasi publik berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola sektor publik yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas informasi, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran. Penguatan manajemen keuangan sektor publik melalui sistem digital berkaitan erat dengan kualitas sistem akuntansi, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses data keuangan pemerintah (Cuadrado-Ballesteros et al., 2022). Selain itu, pengawasan anggaran berbasis digital juga berperan dalam meningkatkan transparansi fiskal pemerintah daerah, sedangkan penerapan e-government dapat menekan potensi penyimpangan dalam pelayanan publik melalui pengurangan proses birokrasi yang tidak efisien (Jin & Wang, 2025; Sadik-Zada et al., 2024).

Salah satu bentuk konkret digitalisasi pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mencakup informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Dalam ruang lingkup keuangan daerah, SIPD memiliki peran penting dalam menghubungkan tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, SIPD tidak hanya dapat dipahami sebagai aplikasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan berbasis data. Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah terbukti dapat mendukung optimalisasi tata kelola keuangan, meskipun dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dari sisi pengguna, mekanisme

kerja, serta kesiapan organisasi (Nasution & Nurwani, 2021). Keberhasilan implementasi SIPD juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung (Balqis et al., 2021).

Penerapan SIPD menjadi semakin penting karena pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Namun, penerapan sistem informasi keuangan daerah tidak selalu berjalan secara seragam pada setiap daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi hambatan pada aspek sumber daya manusia, keterbatasan akses menu, kapasitas server, gangguan jaringan, serta teknis pelaporan (Tumija et al., 2023). Implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah juga memberikan manfaat terhadap efisiensi kerja, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan aparatur, aplikasi yang kurang fleksibel, jaringan yang belum stabil, serta belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah (Tumija & Erlambang, 2023).

Permasalahan serupa juga tampak pada aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Tahap pelaksanaan dan penatausahaan memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan proses penerbitan dokumen keuangan, pencairan anggaran, pencatatan transaksi, serta pelaporan realisasi keuangan. Apabila proses ini tidak berjalan efektif, maka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat terhambat. SIPD penatausahaan berperan penting dalam mendukung media pelaporan keuangan, tetapi masih ditemukan hambatan pada mekanisme pelaporan, penggunaan aplikasi, dan penyesuaian pengguna terhadap sistem (Meynaldi & Rosalina, 2024). Selain itu, implementasi SIPD memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan, sehingga efektivitas sistem ini sangat menentukan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah (Fitriani & Solikhin, 2025).

Meskipun SIPD telah dirancang untuk menyeragamkan proses pengelolaan keuangan daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan implementasinya masih berbeda antarwilayah. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, kualitas pendampingan, serta kemampuan daerah dalam menyesuaikan proses kerja dengan sistem digital yang diterapkan. Implementasi SIPD pada beberapa daerah masih memerlukan penguatan dari aspek pemanfaatan sistem, kapasitas aparatur, serta kesesuaian prosedur kerja agar dapat berjalan lebih optimal (Tanan et al., 2025). Evaluasi terhadap SIPD juga perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung penyajian laporan keuangan daerah secara efektif, akurat, dan tepat waktu (Rezkiaty et al., 2024). Dengan demikian, penerapan SIPD tidak cukup hanya dinilai dari tersedianya aplikasi, tetapi juga harus dilihat dari kesiapan organisasi, kelancaran proses, serta manfaat nyata yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan sistem pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh tata kelola, kapasitas kelembagaan, keamanan data, dan kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Inovasi e-government dapat mendorong otomatisasi proses informasi publik, namun tetap menghadapi tantangan pada aspek regulasi, keamanan data, dan risiko kebocoran informasi (Kassen, 2022). Oleh karena itu, transformasi digital sektor publik harus dikelola secara hati-hati melalui desain sistem yang memadai, penguatan kapasitas pengguna, serta pengawasan yang berkelanjutan. Evaluasi e-government melalui model CIPP dapat digunakan untuk menilai kesesuaian konteks kebijakan, kesiapan input, proses pelaksanaan, dan hasil program secara lebih komprehensif (Pakpahan, 2024). Model CIPP memiliki keunggulan sebagai kerangka evaluasi yang sistematis karena mampu menilai program dari aspek konteks, input, proses, dan produk, sehingga relevan digunakan untuk mengevaluasi implementasi program berbasis sistem informasi pemerintahan (Zahroh et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tingkat provinsi di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini memiliki relevansi karena masih terdapat kesenjangan antara desain ideal SIPD sebagai

sistem nasional yang terintegrasi dengan realitas pelaksanaannya di daerah. Sebagian penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi SIPD di tingkat kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah tertentu, atau pada tahapan perencanaan dan pelaporan, sedangkan kajian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada tingkat provinsi dengan membandingkan variasi kinerja daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD pada tingkat provinsi dengan menggunakan model evaluasi CIPP, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil penerapan SIPD.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tingkat provinsi di Indonesia. Evaluasi ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana SIPD telah mendukung pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian e-government dan manajemen keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi SIPD, khususnya pada aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, agar tujuan digitalisasi tata kelola keuangan daerah dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks implementasi sistem informasi pemerintahan, efektivitas pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SIPD memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan integrasi data, memperkuat transparansi, serta mendorong efisiensi administrasi pemerintahan. Kajian mengenai penerapan SIPD pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa sistem ini dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman aparatur, dukungan infrastruktur, serta kejelasan mekanisme kerja dalam pelaksanaannya (Balqis et al., 2021; Nasution & Nurwani, 2021). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada implementasi SIPD secara umum, sehingga belum secara spesifik mengkaji pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagai tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya juga lebih banyak menempatkan SIPD sebagai objek kajian pada tingkat kabupaten/kota atau pada organisasi perangkat daerah tertentu. Kajian mengenai penerapan SIPD di Kota Semarang menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya, fasilitas sistem, kapasitas server, serta menu akuntansi dan pelaporan yang belum sepenuhnya optimal (Tumija et al., 2023). Penelitian lain mengenai SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan bahwa sistem ini memberikan manfaat dalam proses perencanaan anggaran, namun fokus penelitian tersebut masih terbatas pada tahap perencanaan dan belum membahas secara mendalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah (Tumija & Erlambang, 2023). Hal serupa juga terlihat pada kajian efektivitas perencanaan anggaran dalam SIPD di Kabupaten Gresik yang menekankan efektivitas tahap perencanaan, bukan pada proses pelaksanaan anggaran, penerbitan dokumen penatausahaan, pencairan, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Tumija & Ramadhan, 2023).

Selain itu, beberapa penelitian SIPD lebih banyak diarahkan pada keterkaitan sistem dengan kualitas laporan keuangan daerah. Kajian di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa optimalisasi SIPD berhubungan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, intensitas penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (Wahyudi et al., 2024). Penelitian di Kota Denpasar juga menunjukkan bahwa penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, khususnya jika didukung

oleh pemahaman akuntansi aparatur dan evaluasi yang berkelanjutan (Sinurat & Sari, 2025). Meskipun kajian-kajian tersebut relevan dalam menjelaskan manfaat SIPD terhadap pelaporan keuangan, ruang lingkupnya masih lebih menekankan hasil akhir berupa kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian pada aspek proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang menjadi tahapan antara sebelum laporan keuangan disusun.

Pada tingkat yang lebih luas, kajian mengenai e-government dan digitalisasi keuangan sektor publik juga menunjukkan bahwa sistem digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi informasi, dan kualitas pengambilan keputusan dalam sektor publik (Cuadrado-Ballesteros et al., 2022; Kassen, 2022). Penerapan teknologi digital dalam tata kelola anggaran juga dinilai mampu memperkuat transparansi fiskal dan mengurangi potensi penyimpangan birokratis dalam pelayanan publik (Jin & Wang, 2025; Sadik-Zada et al., 2024). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya berada pada konteks e-government secara luas dan belum secara khusus menjelaskan dinamika implementasi SIPD sebagai sistem nasional pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, terutama pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di tingkat provinsi. Di sisi lain, penggunaan model evaluasi CIPP dalam penelitian kebijakan dan program pemerintahan telah banyak digunakan karena mampu menilai suatu program secara komprehensif melalui dimensi context, input, process, dan product. Model CIPP dinilai relevan untuk mengevaluasi program berbasis sistem karena tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menilai kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, serta manfaat yang dihasilkan (Pakpahan, 2024; Zahroh et al., 2025). Namun demikian, penggunaan model CIPP dalam kajian SIPD masih relatif terbatas, khususnya untuk mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada tingkat provinsi. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, efektivitas, atau model sistem informasi, sehingga belum memberikan gambaran evaluatif yang utuh mengenai bagaimana SIPD berjalan dari sisi konteks kebijakan, kesiapan input, kelancaran proses, dan hasil penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tingkat provinsi di Indonesia dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada implementasi SIPD secara umum, perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan pada tingkat kabupaten/kota, atau pengaruh SIPD terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, penelitian yang membandingkan pelaksanaan SIPD pada beberapa provinsi dengan variasi kinerja berbeda masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tingkat provinsi melalui perbandingan Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jambi sebagai representasi daerah dengan kategori kinerja yang berbeda. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan mengenai pelaksanaan SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi menjadi penting dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak lagi hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan karena berbagai persoalan dalam sistem keuangan daerah yang belum optimal dapat menghambat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik (Rahmadany, 2024). Oleh karena itu, evaluasi terhadap SIPD menjadi penting agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana sistem tersebut benar-benar mampu mendukung tata kelola keuangan daerah sesuai dengan tujuan kebijakan.

Secara keilmuan, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian mengenai e-government dan manajemen keuangan publik, khususnya dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SIPD memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, jaringan, kapasitas server, fitur sistem, serta pemahaman aparatur terhadap mekanisme aplikasi (Tumija et al., 2023; Tumija & Erlambang, 2023). Selain itu, beberapa kajian SIPD masih banyak berfokus pada perencanaan anggaran atau kualitas laporan keuangan, sementara evaluasi terhadap tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada tingkat provinsi masih relatif terbatas (Wahyudi et al., 2024; Sinurat & Sari, 2025). Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi akademik yang lebih spesifik terhadap pengembangan kajian SIPD dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi empiris, urgensi penelitian ini terletak pada adanya perbedaan tingkat implementasi SIPD antarprovinsi. SIPD dirancang sebagai sistem nasional yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah, tetapi pelaksanaannya tidak selalu berjalan seragam karena dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, pedoman teknis, serta kemampuan daerah dalam menyesuaikan proses kerja dengan sistem digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak cukup dilakukan secara umum, tetapi perlu melihat variasi kinerja daerah agar dapat menggambarkan perbedaan capaian implementasi secara lebih objektif. Penggunaan model CIPP menjadi relevan karena mampu menilai program secara lebih menyeluruh melalui aspek konteks, input, proses, dan produk, sehingga evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, dan kelancaran proses pelaksanaan (Mandasari & Endasari, 2024; Zahroh et al., 2025).

Secara praktis, penelitian ini penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi SIPD, khususnya pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Tanpa evaluasi yang komprehensif, pemerintah berpotensi hanya menilai keberhasilan SIPD dari aspek penggunaan aplikasi, tanpa memahami persoalan yang terjadi dalam proses penerbitan dokumen keuangan, pencatatan transaksi, pencairan, pembukuan, dan pelaporan. Padahal, penerapan sistem informasi pemerintahan daerah memiliki hubungan erat dengan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Sinurat & Sari, 2025). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan, penguatan kapasitas aparatur, penyempurnaan fitur sistem, serta penyusunan bisnis proses yang lebih seragam dan operasional.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka terdapat potensi bahwa permasalahan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tidak teridentifikasi secara utuh. Hal ini dapat berdampak pada berlanjutnya ketidaksamaan pemahaman antarperangkat daerah, belum optimalnya pemanfaatan fitur sistem, lambatnya proses administrasi keuangan, serta belum meratanya manfaat SIPD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi akademik dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan dan e-government, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam mendukung perbaikan implementasi SIPD pada tingkat provinsi di Indonesia.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), baik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, maupun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIPD memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa implementasi SIPD belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi,

kualitas sistem, stabilitas jaringan, serta kesesuaian proses kerja dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Penelitian (Balqis et al., 2021) mengkaji implementasi aplikasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian (Nasution & Nurwani, 2021) juga membahas penerapan SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut menemukan bahwa SIPD telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih menghadapi kendala teknis seperti jaringan yang belum stabil, menu aplikasi yang perlu disesuaikan, serta perlunya peningkatan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem.

Selanjutnya, penelitian (Tumija et al., 2023) menganalisis penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Semarang. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa SIPD telah mendukung proses pengelolaan keuangan daerah, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, sarana pendukung, kapasitas server, serta beberapa menu sistem yang belum sepenuhnya optimal. Penelitian (Tumija & Erlambang, 2023) mengkaji implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIPD membantu proses perencanaan anggaran, tetapi masih terdapat hambatan berupa keterbatasan kemampuan aparatur, aplikasi yang kurang fleksibel, gangguan server, jaringan yang belum stabil, serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal.

Penelitian lain dilakukan oleh (Tumija & Ramadhan, 2023) mengenai efektivitas perencanaan anggaran dalam SIPD di Kabupaten Gresik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIPD berperan dalam mendukung proses perencanaan anggaran daerah, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketepatan waktu input data, kemampuan operator, dan kesiapan perangkat daerah dalam mengikuti tahapan sistem. Berbeda dengan penelitian tersebut yang lebih menitikberatkan pada tahap perencanaan anggaran, penelitian ini berfokus pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Hal ini menjadi penting karena pelaksanaan dan penatausahaan merupakan tahapan yang berkaitan langsung dengan penerbitan dokumen keuangan, pencatatan transaksi, pencairan anggaran, pembukuan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kajian mengenai SIPD dalam hubungannya dengan kualitas laporan keuangan juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian (Wahyudi et al., 2024) menganalisis optimalisasi penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Sinurat & Sari, 2025) juga mengkaji praktik pelaporan keuangan daerah dengan melihat hubungan antara literasi akuntansi aparatur dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIPD memiliki keterkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah, khususnya apabila didukung oleh pemahaman akuntansi dan kapasitas aparatur yang memadai.

Selain itu, penelitian (Meynaldi & Rosalina, 2024) mengkaji peran SIPD penatausahaan terhadap media pelaporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIPD penatausahaan berperan dalam mendukung proses pelaporan keuangan, tetapi masih terdapat hambatan dalam penggunaan aplikasi, penyesuaian

pengguna, dan mekanisme pelaporan. Penelitian (Rezkiaty et al., 2024) juga mengevaluasi implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah berjalan cukup baik, namun masih membutuhkan komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat untuk mengatasi kendala teknis yang muncul dalam pelaksanaan sistem.

Dalam konteks transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, penelitian (Rahmadany, 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan daerah diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan akuntabel. Namun, transformasi digital tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, keterbatasan pemahaman aparatur, serta belum meratanya kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi sistem digital. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian SIPD sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan kesesuaian proses bisnis.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian SIPD masih berfokus pada implementasi sistem secara umum, perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten/kota, atau pengaruh SIPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, sebagian penelitian masih menempatkan SIPD sebagai objek kajian pada satu daerah atau satu perangkat daerah tertentu, sehingga belum banyak penelitian yang membandingkan pelaksanaan SIPD pada beberapa provinsi dengan kategori kinerja yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tingkat provinsi di Indonesia menggunakan model evaluasi CIPP. Melalui perbandingan Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jambi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu, terutama dari segi objek, pendekatan evaluasi, dan fokus pembahasan. Dari sisi objek, penelitian ini secara spesifik mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi dengan membandingkan tiga daerah yang memiliki kategori kinerja berbeda, yaitu Provinsi Jawa Barat sebagai daerah berkinerja baik, Provinsi Banten sebagai daerah berkinerja moderat, dan Provinsi Jambi sebagai daerah berkinerja rendah. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengkaji SIPD pada satu kabupaten/kota atau satu perangkat daerah tertentu. Dari sisi pendekatan, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang menilai implementasi SIPD melalui dimensi context, input, process, dan product, sehingga evaluasi tidak hanya melihat keberadaan sistem atau hasil akhir pelaporan, tetapi juga menilai kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, kelancaran proses, serta manfaat penerapan SIPD secara lebih komprehensif. Kebaruan lainnya terletak pada fokus penelitian yang diarahkan pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, bukan hanya pada aspek perencanaan anggaran atau kualitas laporan keuangan sebagaimana banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan SIPD sebagai sistem nasional tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi dan ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh keseragaman bisnis proses, kapasitas aparatur, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan daerah dalam menyesuaikan tata kerja keuangan dengan sistem digital. Hal ini sejalan dengan pandangan (Akbar,

2013) yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik, serta diperkuat oleh (Ridwan & Baso, 2017) yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang sesuai dengan kondisi daerah. Selain itu, penelitian (Tumija et al., 2023), (Wahyudi et al., 2024), dan (Sinurat & Sari, 2025) menunjukkan bahwa penerapan SIPD berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan daerah, namun penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menempatkan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagai fokus utama evaluasi pada tingkat provinsi.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi, terutama melalui pengalaman, pandangan, dan penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan maupun pengelolaan sistem. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data, pemaknaan terhadap fenomena, serta pemahaman yang komprehensif terhadap konteks sosial dan kelembagaan yang diteliti (Nurdin & Hartati, 2019). Selain itu, paradigma konstruktivisme digunakan karena implementasi SIPD tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis aplikasi, tetapi juga sebagai realitas yang terbentuk melalui praktik kerja, pemahaman aparatur, koordinasi kelembagaan, serta interaksi antara perumus kebijakan, pengembang sistem, dan pengguna SIPD di daerah. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai sesuai untuk mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan SIPD secara lebih kontekstual dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang terdiri atas empat dimensi, yaitu context, input, process, dan product. Model CIPP digunakan karena mampu mengevaluasi suatu program atau kebijakan secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian latar belakang dan tujuan program, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil atau manfaat yang dicapai. Dalam penelitian ini, dimensi context digunakan untuk menilai kesesuaian tujuan SIPD dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah; dimensi input digunakan untuk melihat kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan sistem; dimensi process digunakan untuk menilai pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD; sedangkan dimensi product digunakan untuk melihat hasil dan manfaat penerapan SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan model evaluasi ini sejalan dengan kebutuhan penelitian pemerintahan yang tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menilai keterkaitan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil program secara sistematis (Simangunsong, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, maupun penggunaan SIPD. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri karena memiliki kedudukan sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah sekaligus perumus kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD. Selain itu,

informan penting lainnya adalah pihak Pusat Data dan Sistem Informasi atau pihak pengembang sistem yang memahami aspek teknis aplikasi SIPD. Adapun informan pendukung terdiri atas pengguna SIPD pada pemerintah provinsi, khususnya pihak BPKAD/BPKPD Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jambi, karena ketiga provinsi tersebut menjadi objek perbandingan berdasarkan kategori kinerja SIPD yang berbeda.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif moderat, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan sesuai dimensi CIPP, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih terbuka. Observasi partisipatif moderat dilakukan dengan cara peneliti hadir dan mengamati secara langsung sebagian aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan SIPD, namun tidak terlibat penuh sebagai pelaksana utama. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti data APBD, data penerbitan dokumen SP2D, data transfer dana, dokumen pelaksanaan dan penatausahaan, serta dokumen lain yang mendukung evaluasi pelaksanaan SIPD pada tingkat provinsi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara saling melengkapi agar informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga diperkuat oleh dokumen dan hasil pengamatan lapangan.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan pusat, pengembang sistem, dan pengguna SIPD pada pemerintah provinsi. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara tersebut, data yang diperoleh dapat diuji konsistensinya sehingga hasil penelitian lebih dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana digunakan dalam analisis data kualitatif (Miles et al., 2014). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan dimensi CIPP untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tingkat provinsi.

Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai lokus utama karena instansi tersebut berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pelaksanaan SIPD. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dan informasi dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jambi sebagai daerah pembanding berdasarkan variasi kinerja SIPD. Provinsi Jawa Barat mewakili kategori baik, Provinsi Banten mewakili kategori moderat, sedangkan Provinsi Jambi mewakili kategori rendah. Pelaksanaan pengumpulan data utama dilakukan pada Januari 2026, yang mencakup proses wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen pendukung. Dengan pemilihan lokasi, informan, dan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tingkat provinsi di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tujuan utama penelitian, yaitu mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi di Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan model CIPP yang terdiri atas empat dimensi, yaitu context, input, process, dan product. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana SIPD telah dilaksanakan sesuai

dengan tujuan kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil atau manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan model ini, pembahasan tidak hanya menilai keberadaan SIPD sebagai aplikasi, tetapi juga menelaah kesesuaian antara desain kebijakan nasional dengan praktik pelaksanaan di daerah.

Hasil dan pembahasan difokuskan pada tiga provinsi yang memiliki kategori kinerja berbeda, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jambi. Provinsi Jawa Barat merepresentasikan daerah dengan kategori implementasi SIPD yang baik, Provinsi Banten merepresentasikan kategori moderat, sedangkan Provinsi Jambi merepresentasikan kategori rendah. Pemilihan ketiga provinsi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komparatif mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD. Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini disusun berdasarkan masing-masing dimensi CIPP agar dapat menunjukkan perbedaan kondisi implementasi SIPD secara lebih sistematis, mulai dari kesesuaian kebijakan, kesiapan input, kelancaran proses, hingga hasil penerapan sistem dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada tingkat provinsi belum berjalan optimal secara merata. SIPD telah memberikan arah kebijakan yang jelas dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, namun pelaksanaannya masih menunjukkan perbedaan antarprovinsi. Perbedaan tersebut terlihat dari kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, pemahaman terhadap alur kerja sistem, konsistensi penggunaan aplikasi, serta manfaat yang dirasakan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan hasil evaluasi berdasarkan dimensi context, input, process, dan product sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada SIPD tingkat provinsi di Indonesia.

3.1 Context

Dimensi context dalam evaluasi CIPP digunakan untuk menilai latar belakang, kebutuhan, tujuan, sasaran, serta kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan sasaran. Dalam penelitian ini, dimensi context diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dipahami dan diterapkan oleh pemerintah provinsi. Dimensi ini menjadi penting karena SIPD tidak hanya diposisikan sebagai aplikasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan nasional yang bertujuan membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi. Oleh karena itu, keberhasilan SIPD tidak cukup dinilai dari tersedianya sistem, melainkan juga dari sejauh mana pemerintah daerah memahami tujuan kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan penggunaan sistem, serta menyesuaikan pelaksanaan SIPD dengan kondisi faktual di daerah masing-masing.

Pada indikator pertama, yaitu penentuan tujuan dan sasaran program, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga provinsi pada dasarnya telah memahami tujuan utama penerapan SIPD. SIPD dipahami sebagai sistem nasional yang diarahkan untuk menyeragamkan tata kelola keuangan daerah, mengintegrasikan tahapan pengelolaan keuangan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. Provinsi Jawa Barat menunjukkan pemahaman yang paling kuat karena pemerintah daerah tidak hanya memandang SIPD sebagai kewajiban regulatif dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memahami bahwa SIPD berfungsi untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah

dalam satu sistem yang saling terhubung. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran SIPD telah diterima secara substantif, bukan hanya secara administratif.

Berbeda dengan Jawa Barat, Provinsi Banten juga telah memahami tujuan SIPD sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integrasi data keuangan daerah. Namun, pemahaman tersebut masih berada pada kategori moderat karena belum sepenuhnya diikuti oleh penerapan teknis yang konsisten pada seluruh perangkat daerah. Banten telah menerima SIPD sebagai instrumen reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih menghadapi kebutuhan penyesuaian, terutama pada pemahaman pengguna, fleksibilitas sistem, dan penyamaan alur kerja. Sementara itu, Provinsi Jambi memahami SIPD secara normatif sebagai sistem yang dibutuhkan untuk memperbaiki integrasi data dan efisiensi administrasi, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan ke dalam praktik pelaksanaan yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator tujuan dan sasaran program, seluruh provinsi telah menerima arah kebijakan SIPD, tetapi terdapat perbedaan kedalaman pemahaman dan kemampuan operasionalisasi antarprovinsi.

Pada indikator kedua, yaitu identifikasi kebutuhan sasaran program, SIPD dinilai relevan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah di ketiga provinsi. Kebutuhan utama yang ingin dipenuhi melalui SIPD meliputi integrasi data keuangan, monitoring realisasi anggaran, pengendalian dokumen, standardisasi proses, keterlacakan transaksi, pencegahan duplikasi pencatatan, serta peningkatan akuntabilitas penatausahaan keuangan. Provinsi Jawa Barat menunjukkan identifikasi kebutuhan yang paling spesifik dan teknis. Dengan volume transaksi dan jumlah perangkat daerah yang besar, Jawa Barat membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan dokumen penganggaran, pengajuan pembayaran, pencairan dana, dan pelaporan secara konsisten. Dalam konteks ini, SIPD dipandang mampu menjawab kebutuhan daerah terhadap data yang cepat, akurat, dan dapat dipantau secara real-time.

Provinsi Banten juga mengidentifikasi kebutuhan SIPD pada aspek integrasi data, pengendalian dokumen, monitoring realisasi anggaran, dan tertib administrasi keuangan. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada sinkronisasi data dan pemahaman pengguna terhadap alur sistem. Artinya, Banten telah mampu mengenali kebutuhan yang ingin dicapai melalui SIPD, tetapi pelaksanaan teknisnya masih membutuhkan pendampingan dan penyempurnaan sistem. Adapun Provinsi Jambi mengidentifikasi kebutuhan SIPD pada aspek integrasi data antarperangkat daerah, standardisasi administrasi, monitoring realisasi anggaran, dan pengendalian dokumen keuangan. Kebutuhan tersebut menjadi penting karena Jambi masih menghadapi keterbatasan dalam efisiensi administrasi, kapasitas pengguna, dan koordinasi penatausahaan. Namun, pemenuhan kebutuhan di Jambi belum berjalan merata karena sebagian proses masih memerlukan pendampingan teknis, bahkan masih ditemukan praktik double input dalam penyelesaian dokumen keuangan.

Pada indikator ketiga, yaitu keselarasan tujuan program dengan sasaran program, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD secara konseptual selaras dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah. Ketiga provinsi mengakui bahwa tujuan SIPD sesuai dengan kebutuhan untuk membangun sistem keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Di Provinsi Jawa Barat, keselarasan antara tujuan SIPD dan sasaran program terlihat cukup tinggi karena pemerintah daerah mampu menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam praktik operasional yang relatif stabil. SIPD telah membantu meningkatkan ketertiban administrasi, integrasi data, dan pengelolaan keuangan berbasis sistem. Meskipun masih terdapat kebutuhan penyempurnaan fitur tertentu, seperti

pada pengelolaan keuangan BLUD, kendala tersebut tidak mengubah kesesuaian dasar antara tujuan SIPD dan kebutuhan daerah.

Di Provinsi Banten, keselarasan tujuan SIPD dengan kebutuhan daerah berada pada kategori cukup. Secara konseptual, SIPD telah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi administrasi, integrasi data, dan pengendalian dokumen keuangan. Namun, pada tingkat operasional, keselarasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada fleksibilitas sistem, pemahaman pengguna, sinkronisasi data, dan penyesuaian terhadap kondisi teknis daerah. Dengan demikian, Banten menunjukkan bahwa penerimaan terhadap tujuan kebijakan sudah baik, tetapi implementasi tujuan tersebut masih membutuhkan penguatan agar sasaran program dapat dicapai secara lebih konsisten.

Di Provinsi Jambi, keselarasan tujuan SIPD dengan sasaran program masih lebih lemah dibandingkan Jawa Barat dan Banten. Secara teori, tujuan SIPD telah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal integrasi data, standardisasi proses, percepatan verifikasi, dan peningkatan akuntabilitas. Namun, pada praktiknya, keselarasan tersebut belum berjalan kuat karena masih terdapat keterbatasan kapasitas SDM, kendala teknis, proses manual, serta belum seragamnya alur kerja penatausahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara pemahaman terhadap tujuan kebijakan dan kemampuan daerah dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, SIPD relevan bagi Jambi, tetapi kesiapan daerah dalam menerapkan sistem masih belum cukup kuat untuk mendukung pencapaian tujuan secara optimal.

Jika dibandingkan antarprovinsi, dimensi context menunjukkan bahwa Jawa Barat berada pada posisi paling matang, Banten berada pada posisi cukup atau moderat, sedangkan Jambi berada pada posisi paling lemah. Jawa Barat telah mampu menghubungkan tujuan strategis SIPD dengan kebutuhan teknis penatausahaan keuangan daerah. Banten telah memahami tujuan dan kebutuhan SIPD, tetapi masih menghadapi kendala dalam internalisasi kebijakan pada tingkat pengguna dan perangkat daerah. Jambi telah menerima SIPD sebagai kebijakan yang relevan, tetapi pemahamannya masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan operasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sama tidak selalu menghasilkan tingkat implementasi yang sama, karena keberhasilan pada dimensi context sangat dipengaruhi oleh kedalaman pemahaman, identifikasi kebutuhan, dan kemampuan daerah dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam praktik kerja.

Dengan demikian, hasil evaluasi pada dimensi context menunjukkan bahwa SIPD merupakan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada tingkat provinsi. Tidak ditemukan penolakan mendasar terhadap kebijakan SIPD, karena ketiga provinsi memahami bahwa sistem ini dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Namun, relevansi kebijakan belum otomatis menjamin keberhasilan implementasi. Jawa Barat menunjukkan bahwa pemahaman kebijakan yang kuat dapat mendukung pelaksanaan yang lebih stabil. Banten menunjukkan bahwa pemahaman tujuan perlu diperkuat dengan pendampingan dan penyamaan persepsi pengguna. Sementara itu, Jambi menunjukkan bahwa pemahaman normatif belum cukup apabila tidak didukung oleh kapasitas SDM, kejelasan proses, dan kesiapan teknis. Oleh karena itu, dimensi context menegaskan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya bergantung pada tujuan kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam memahami, menerima, dan mengoperasionalkan tujuan tersebut sesuai kebutuhan daerah.

3.2 Input

Dimensi input dalam evaluasi CIPP digunakan untuk menilai kesiapan masukan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program. Dalam konteks penelitian ini, dimensi input diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah provinsi memiliki kesiapan sumber daya dan perencanaan yang memadai dalam melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dimensi ini menjadi penting karena keberhasilan SIPD tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, infrastruktur teknologi, kualitas sistem, pedoman teknis, serta kesiapan daerah dalam menjalankan alur kerja penatausahaan secara digital. Dengan demikian, input merupakan fondasi utama yang menentukan apakah tujuan SIPD dapat diterjemahkan secara nyata dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Pada indikator pertama, yaitu ketersediaan sumber daya, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jambi. Ketersediaan sumber daya dalam dimensi ini mencakup sumber daya manusia, dukungan dana, infrastruktur teknologi, jaringan, perangkat pendukung, dan kesiapan operator dalam menggunakan aplikasi SIPD. Secara umum, Provinsi Jawa Barat memiliki kesiapan sumber daya yang paling memadai dibandingkan dua provinsi lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki aparatur dan operator SIPD yang lebih siap dalam menjalankan sistem, didukung oleh infrastruktur teknologi yang relatif stabil, serta mekanisme koordinasi yang lebih baik antarperangkat daerah. Kondisi tersebut membuat implementasi SIPD di Jawa Barat dapat berjalan lebih tertib dan lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Kesiapan input di Provinsi Jawa Barat terlihat dari kemampuan daerah dalam menyediakan aparatur yang memahami alur kerja SIPD, mengikutsertakan operator dalam kegiatan bimbingan teknis, serta membangun koordinasi internal yang lebih terstruktur. Dalam pelaksanaan SIPD, keberadaan operator yang memahami sistem menjadi aspek penting karena proses penatausahaan keuangan daerah melibatkan tahapan yang cukup kompleks, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi, penerbitan SPP, SPM, SP2D, pencatatan kas, pembukuan, hingga pelaporan. Apabila aparatur tidak memahami alur tersebut, maka sistem yang seharusnya mempercepat proses administrasi justru berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kesalahan input. Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia di Jawa Barat menjadi salah satu faktor yang membuat provinsi ini mampu menjalankan SIPD dengan lebih baik dibandingkan Banten dan Jambi.

Selain sumber daya manusia, dukungan infrastruktur juga menjadi kekuatan utama Provinsi Jawa Barat dalam dimensi input. Infrastruktur yang relatif stabil memungkinkan proses penggunaan SIPD berjalan lebih lancar, terutama dalam akses sistem, pengunggahan dokumen, verifikasi data, dan pemantauan realisasi keuangan. Ketersediaan perangkat kerja dan jaringan yang memadai membantu perangkat daerah dalam menjalankan tugas penatausahaan secara elektronik. Meskipun demikian, bukan berarti Jawa Barat tidak menghadapi permasalahan sama sekali. Masih terdapat kebutuhan penyempurnaan fitur tertentu dan penguatan integrasi sistem, terutama agar modul pelaksanaan, penatausahaan, kas, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan dapat bekerja lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan dua provinsi lainnya, kendala tersebut masih dapat dikelola karena didukung oleh input yang lebih kuat.

Provinsi Banten berada pada posisi moderat dalam dimensi input. Hal ini berarti bahwa Banten pada dasarnya telah memiliki sumber daya untuk menjalankan SIPD, tetapi kesiapan tersebut belum merata pada seluruh perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Banten telah menggunakan SIPD dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, namun masih terdapat perbedaan kemampuan antaraparatur dalam memahami sistem. Sebagian operator telah mampu menjalankan

aplikasi dengan baik, tetapi sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan dan penguatan kapasitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di Banten sudah ada, tetapi kualitas dan pemerataan kompetensinya masih perlu ditingkatkan.

Kondisi input di Provinsi Banten juga menunjukkan bahwa infrastruktur dan jaringan telah tersedia, namun belum sepenuhnya stabil dalam mendukung seluruh proses penatausahaan. Pada beberapa kondisi, gangguan teknis dan keterbatasan sistem masih memengaruhi kelancaran penggunaan SIPD. Hal ini berdampak pada proses pelaksanaan administrasi keuangan, terutama ketika perangkat daerah harus melakukan input data, verifikasi dokumen, dan sinkronisasi informasi keuangan. Dengan demikian, Banten tidak berada pada posisi yang sepenuhnya lemah, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek pemerataan kompetensi SDM, stabilitas infrastruktur, dan penyamaan pemahaman antarpengguna agar pelaksanaan SIPD dapat berjalan lebih konsisten.

Sementara itu, Provinsi Jambi menunjukkan kondisi input yang paling terbatas dibandingkan Jawa Barat dan Banten. Keterbatasan tersebut terlihat dari kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, infrastruktur jaringan yang belum sepenuhnya mendukung, serta kesiapan teknis yang masih memerlukan pendampingan intensif. Pada daerah dengan input yang belum memadai, SIPD cenderung sulit berjalan optimal karena aparatur harus menyesuaikan diri dengan sistem digital yang memiliki alur kerja cukup kompleks. Apabila kemampuan aparatur belum cukup kuat, maka proses pelaksanaan dan penatausahaan berisiko mengalami keterlambatan, kesalahan input, bahkan ketergantungan pada bantuan teknis dari pihak lain.

Keterbatasan input di Provinsi Jambi juga tampak pada aspek infrastruktur dan penggunaan modul sistem. Dalam pelaksanaan SIPD, jaringan dan perangkat pendukung menjadi komponen penting karena seluruh proses penatausahaan diarahkan untuk berjalan secara elektronik. Ketika jaringan tidak stabil atau perangkat kerja belum memadai, maka proses input data, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan dapat terhambat. Selain itu, modul kas dan pembukuan di Jambi belum berjalan secara optimal, sehingga proses penatausahaan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan SIPD sebagai sistem yang terintegrasi dan real-time. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan input di Jambi bukan hanya berkaitan dengan jumlah aparatur, tetapi juga menyangkut kualitas kemampuan teknis, kesiapan sistem, infrastruktur digital, dan dukungan operasional.

Pada indikator kedua, yaitu kualitas perencanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD membutuhkan rencana kerja, pedoman teknis, bisnis proses, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Kualitas perencanaan menjadi penting karena SIPD tidak dapat dijalankan hanya dengan menyediakan aplikasi, tetapi juga memerlukan alur kerja yang dipahami oleh seluruh pengguna. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, aparatur perlu mengetahui tahapan kerja, pembagian kewenangan, mekanisme verifikasi, prosedur koreksi, serta hubungan antara dokumen penganggaran, dokumen pelaksanaan, dokumen pencairan, dan pelaporan. Tanpa perencanaan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat menafsirkan alur kerja SIPD secara berbeda, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam implementasi.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan kualitas perencanaan yang relatif lebih baik karena telah memiliki pola koordinasi dan kesiapan operasional yang lebih terstruktur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menyusun langkah-langkah pelaksanaan SIPD secara lebih sistematis melalui penyiapan operator, koordinasi antarperangkat daerah, serta pemanfaatan data untuk mendukung proses penatausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa input di Jawa Barat tidak hanya kuat pada aspek sumber daya, tetapi juga pada aspek perencanaan pelaksanaan. Dengan perencanaan yang lebih baik, penggunaan SIPD dapat lebih mudah diarahkan sesuai tujuan kebijakan, yaitu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

Provinsi Banten memiliki dasar perencanaan penggunaan SIPD, tetapi kualitasnya masih berada pada tingkat sedang. Banten telah memiliki struktur pelaksanaan dan aparatur yang menjalankan SIPD, namun belum seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai alur penatausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan SIPD belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman praktik pada seluruh unit kerja. Dalam konteks ini, Banten memerlukan penguatan pedoman teknis internal dan penyusunan standar operasional prosedur yang lebih jelas agar seluruh perangkat daerah memiliki acuan yang sama dalam menjalankan proses pelaksanaan dan penatausahaan melalui SIPD.

Adapun Provinsi Jambi menunjukkan kualitas perencanaan yang masih lemah. Hal ini terlihat dari belum optimalnya kesiapan aparatur, belum kuatnya alur kerja internal, serta masih adanya kebutuhan pendampingan teknis dalam penggunaan SIPD. Ketika perencanaan belum matang, penggunaan SIPD menjadi lebih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem kerja yang terintegrasi. Dalam kondisi tersebut, aparatur cenderung hanya mengikuti kebutuhan input sistem tanpa memahami secara menyeluruh hubungan antartahapan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, tujuan SIPD untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan akuntabilitas belum dapat tercapai secara optimal.

Perbandingan antarprovinsi menunjukkan bahwa dimensi input menjadi salah satu faktor utama yang membedakan tingkat keberhasilan implementasi SIPD. Jawa Barat memiliki input yang paling kuat karena didukung oleh SDM yang lebih siap, infrastruktur yang lebih stabil, serta perencanaan pelaksanaan yang lebih terstruktur. Banten berada pada posisi moderat karena telah memiliki sumber daya dasar, tetapi masih menghadapi keterbatasan pada pemerataan kompetensi aparatur, stabilitas sistem, dan keseragaman alur kerja. Sementara itu, Jambi menghadapi persoalan input yang lebih mendasar, terutama pada aspek kapasitas SDM, dukungan infrastruktur, kesiapan modul, dan kualitas perencanaan internal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang sama dapat menghasilkan capaian implementasi yang berbeda apabila kesiapan input setiap daerah tidak berada pada tingkat yang sama.

Dengan demikian, hasil evaluasi pada dimensi input menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD belum didukung oleh kesiapan sumber daya yang merata antarprovinsi. SIPD sebagai sistem nasional membutuhkan dukungan input yang kuat agar dapat dijalankan secara optimal. Pada provinsi yang memiliki SDM, infrastruktur, dan perencanaan yang memadai, SIPD dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih nyata. Sebaliknya, pada provinsi yang memiliki keterbatasan input, implementasi SIPD cenderung menghadapi hambatan dalam proses penatausahaan. Oleh karena itu, dimensi input menegaskan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi dan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan manusia, teknologi, anggaran, pedoman kerja, dan perencanaan pelaksanaan di masing-masing daerah.

3.3 Process

Dimensi process dalam evaluasi CIPP digunakan untuk menilai bagaimana pelaksanaan program berjalan di lapangan. Dalam penelitian ini, dimensi process diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jambi. Dimensi ini menjadi penting karena keberhasilan SIPD tidak cukup dinilai dari adanya kebijakan, kesiapan sumber daya, atau ketersediaan aplikasi, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana proses penggunaan SIPD benar-benar dijalankan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Proses tersebut mencakup pengajuan

dokumen, verifikasi, penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pencatatan kas, pembukuan, rekonsiliasi, hingga pelaporan. Dengan demikian, dimensi process berfungsi untuk melihat apakah SIPD telah berjalan sesuai dengan desain regulasi dan bisnis proses yang diharapkan, atau justru masih menghadapi hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penatausahaan belum optimal.

Secara ideal, SIPD dirancang agar seluruh proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat dilakukan secara elektronik, terintegrasi, dan real-time. Melalui sistem ini, setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah seharusnya terhubung dalam satu alur yang sama, sehingga dapat mengurangi input manual, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat verifikasi dokumen, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks tersebut, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai media input data, tetapi juga sebagai sistem kerja yang mengarahkan aparatur untuk mengikuti prosedur sesuai ketentuan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian proses SIPD pada tiap provinsi belum berjalan sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesiapan input, kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, pemahaman pengguna, serta respons daerah terhadap kendala teknis maupun administratif yang muncul selama pelaksanaan.

Pada indikator pertama, yaitu kualitas dan kesesuaian implementasi dengan rencana, Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang paling baik dibandingkan Banten dan Jambi. Pelaksanaan SIPD di Jawa Barat telah berjalan relatif sesuai dengan desain kebijakan dan regulasi yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu menjalankan tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah secara lebih konsisten, mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, penerbitan dokumen perbendaharaan, hingga pemantauan realisasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Barat tidak hanya memandang SIPD sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi peningkatan tata kelola keuangan daerah. Pemahaman tersebut berpengaruh terhadap keteraturan proses kerja, karena aparatur dan perangkat daerah memiliki orientasi yang lebih jelas dalam menggunakan SIPD sebagai instrumen pengelolaan keuangan.

Kesesuaian proses di Provinsi Jawa Barat juga tampak dari mekanisme kerja internal yang relatif lebih tertib. Proses penatausahaan melalui SIPD telah menjadi bagian dari rutinitas kerja pemerintah daerah, sehingga penggunaan sistem tidak lagi hanya bersifat formalitas. Pengajuan dokumen, verifikasi, dan pencairan dapat dipantau melalui sistem dengan lebih baik. Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah juga berjalan lebih terarah ketika terjadi kekurangan dokumen, kesalahan input, atau kendala teknis tertentu. Meskipun demikian, Jawa Barat masih menghadapi beberapa kebutuhan penyempurnaan, terutama terkait fitur sistem dan penyesuaian alur pada kondisi tertentu. Namun secara umum, hambatan tersebut tidak sampai mengganggu keseluruhan proses secara mendasar karena didukung oleh kapasitas SDM, infrastruktur, dan pola koordinasi yang lebih kuat.

Provinsi Banten menunjukkan kualitas proses yang berada pada kategori sedang atau moderat. Secara umum, Banten telah melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD, tetapi konsistensi prosesnya belum sepenuhnya merata. Sebagian perangkat daerah telah mampu mengikuti alur sistem, namun sebagian lainnya masih menghadapi kesulitan dalam memahami tahapan teknis, melakukan input data, menyesuaikan dokumen, dan menyelesaikan proses verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan sebagai sistem utama, tetapi internalisasi proses kerja belum berjalan sama pada seluruh pengguna. Akibatnya, pelaksanaan penatausahaan masih memerlukan pendampingan, koordinasi, dan pembinaan secara berkala agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap alur sistem.

Dalam konteks Provinsi Banten, permasalahan process tidak hanya berkaitan dengan teknis aplikasi, tetapi juga dengan konsistensi pelaksanaan prosedur. Ketika pemahaman pengguna belum merata, proses penatausahaan dapat mengalami keterlambatan karena dokumen yang diajukan belum lengkap, terdapat kesalahan input, atau pengguna belum memahami tahapan yang harus dilalui dalam sistem. Selain itu, sinkronisasi data juga menjadi bagian penting yang memengaruhi kualitas proses. Apabila data yang masuk ke dalam sistem tidak sinkron atau tidak diperbarui secara tepat, maka proses verifikasi dan pelaporan dapat ikut terganggu. Oleh karena itu, Banten membutuhkan penguatan pada aspek pendampingan teknis, penyamaan alur kerja, serta pengawasan berkala terhadap proses penggunaan SIPD di seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, Provinsi Jambi menunjukkan kondisi process yang paling lemah dibandingkan Jawa Barat dan Banten. Pelaksanaan SIPD di Jambi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan pada hampir seluruh tahapan proses penatausahaan. Keterbatasan kapasitas SDM, belum stabilnya infrastruktur, belum optimalnya modul kas dan pembukuan, serta masih adanya proses manual menyebabkan pelaksanaan SIPD belum sepenuhnya sesuai dengan rencana ideal. Pada kondisi seperti ini, SIPD belum sepenuhnya berfungsi sebagai sistem kerja yang mengintegrasikan seluruh proses keuangan daerah, melainkan masih menjadi aplikasi yang penggunaannya memerlukan banyak penyesuaian dan bantuan teknis.

Masalah process di Provinsi Jambi tampak dari belum optimalnya pelaksanaan alur penatausahaan secara elektronik. Pada satu sisi, SIPD dirancang untuk mengurangi input manual dan menyatukan seluruh proses dalam satu sistem. Namun pada praktiknya, daerah dengan kesiapan terbatas masih dapat menghadapi situasi ketika proses digital belum sepenuhnya menggantikan proses manual. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya double input, keterlambatan sinkronisasi data, kesalahan pencatatan, serta ketidakefisienan administrasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses penerbitan dokumen keuangan dan pencairan anggaran, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dengan demikian, Jambi menunjukkan bahwa proses SIPD sangat bergantung pada kesiapan sumber daya dan kejelasan prosedur kerja yang digunakan oleh daerah.

Pada indikator kedua, yaitu hambatan selama pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan proses SIPD muncul dalam bentuk yang berbeda pada masing-masing provinsi. Di Jawa Barat, hambatan yang muncul relatif lebih bersifat teknis dan penyempurnaan sistem. Artinya, SIPD sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan fitur, penyempurnaan integrasi, dan penyesuaian terhadap kebutuhan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah. Hambatan tersebut masih dapat dikendalikan karena aparatur memiliki kemampuan yang cukup baik untuk melakukan koordinasi internal maupun menyampaikan permasalahan kepada pemerintah pusat.

Di Provinsi Banten, hambatan pelaksanaan lebih berkaitan dengan pemerataan pemahaman pengguna, koordinasi antarperangkat daerah, serta konsistensi penggunaan sistem. Hambatan ini menunjukkan bahwa sistem sudah tersedia dan digunakan, tetapi belum seluruh pengguna memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang sama. Akibatnya, proses pelaksanaan SIPD dapat berjalan tidak seragam antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya. Ketidaksamaan pemahaman tersebut dapat memunculkan keterlambatan input, kesalahan dokumen, serta kebutuhan koreksi yang lebih sering. Oleh karena itu, permasalahan process di Banten lebih menekankan pada perlunya pendampingan teknis dan penyusunan standar operasional yang lebih jelas.

Di Provinsi Jambi, hambatan pelaksanaan lebih mendasar karena berkaitan dengan kapasitas SDM, infrastruktur, ketergantungan pada proses manual, serta belum optimalnya modul utama dalam SIPD. Hambatan tersebut menyebabkan proses pelaksanaan dan penatausahaan belum berjalan sesuai

rencana ideal. Apabila daerah belum memiliki aparatur yang cukup memahami sistem dan belum didukung infrastruktur yang memadai, maka setiap tahapan dalam SIPD akan lebih mudah mengalami gangguan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan process di Jambi tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan aplikasi, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas aparatur, pembinaan intensif, perbaikan jaringan, serta penyusunan alur kerja yang lebih operasional dan mudah dipahami pengguna.

Jika dibandingkan antarprovinsi, dimensi process menunjukkan hubungan yang kuat dengan dimensi input. Provinsi Jawa Barat yang memiliki input lebih baik mampu menjalankan proses SIPD secara lebih stabil. Kesiapan SDM, infrastruktur yang relatif mendukung, serta koordinasi internal yang lebih kuat membuat proses pelaksanaan dan penatausahaan dapat berjalan lebih konsisten. Provinsi Banten yang memiliki input sedang masih menghadapi hambatan berulang dalam pelaksanaan, terutama pada aspek pemahaman pengguna, sinkronisasi data, dan keseragaman proses. Sementara itu, Provinsi Jambi yang memiliki input paling terbatas mengalami hambatan proses paling mendasar, sehingga pelaksanaan SIPD belum mampu berjalan sesuai dengan tujuan ideal sistem.

Dengan demikian, evaluasi pada dimensi process menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD belum berjalan optimal secara merata pada tingkat provinsi. SIPD telah memiliki desain yang baik sebagai sistem digital yang terintegrasi, tetapi pelaksanaan di daerah masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengguna, stabilitas infrastruktur, kejelasan bisnis proses, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi kendala teknis maupun administratif. Jawa Barat dapat dikategorikan paling baik karena proses SIPD relatif stabil dan sesuai dengan alur yang diharapkan. Banten berada pada kategori sedang karena proses sudah berjalan, tetapi belum konsisten pada seluruh perangkat daerah. Adapun Jambi berada pada kategori rendah karena masih menghadapi hambatan mendasar dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan. Oleh karena itu, dimensi process menegaskan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh kelancaran prosedur, keseragaman alur kerja, kemampuan pengguna, serta dukungan teknis yang berkelanjutan.

3.4 Product

Dimensi product dalam evaluasi CIPP digunakan untuk menilai hasil akhir dari suatu program, baik berupa output maupun outcome yang dihasilkan setelah program dilaksanakan. Dalam penelitian ini, dimensi product diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah menghasilkan manfaat nyata bagi pemerintah provinsi. Dimensi ini menjadi penting karena keberhasilan SIPD tidak hanya dapat dilihat dari tersedianya aplikasi, adanya regulasi, atau berjalannya proses input data, tetapi juga harus dilihat dari hasil yang dirasakan oleh pengguna sistem dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut dapat berupa peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi administrasi, keterlacakan dokumen, kemudahan monitoring, validitas data, ketepatan waktu proses keuangan, serta kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem.

Secara ideal, SIPD diharapkan mampu menghasilkan data keuangan daerah yang akurat, real-time, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Produk akhir yang diharapkan dari SIPD bukan hanya dokumen administrasi yang tersimpan secara elektronik, tetapi juga laporan keuangan dan informasi penatausahaan yang dapat dipercaya, mudah diverifikasi, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, dimensi product menilai apakah SIPD telah berhasil

memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya, yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis data.

Pada indikator pertama, yaitu capaian output dan outcome, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat SIPD belum dirasakan secara merata pada Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jambi. Provinsi Jawa Barat menunjukkan capaian product paling baik dibandingkan dua provinsi lainnya. Implementasi SIPD di Jawa Barat telah menghasilkan output positif berupa peningkatan transparansi, efisiensi administrasi, kemudahan monitoring dokumen, keteraturan alur kerja, dan peningkatan akuntabilitas dalam proses keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD di Jawa Barat tidak hanya berjalan secara formal sebagai aplikasi yang wajib digunakan, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan daerah dalam mengelola pelaksanaan dan penatausahaan keuangan.

Capaian product di Provinsi Jawa Barat terlihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan SIPD untuk mengendalikan dokumen keuangan, memantau proses pengajuan dan pencairan, serta memastikan data keuangan tersusun secara lebih tertib. Dengan adanya SIPD, proses penatausahaan keuangan dapat lebih mudah diawasi karena setiap tahapan dapat dilacak melalui sistem. Hal ini memberikan manfaat penting bagi BPKAD maupun perangkat daerah karena proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dapat berjalan lebih terkendali. Selain itu, penggunaan SIPD juga membantu meningkatkan validitas data karena informasi keuangan bersumber dari satu sistem yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa output yang dihasilkan SIPD di Jawa Barat telah bergerak ke arah outcome yang lebih kuat, yaitu terbentuknya budaya kerja berbasis data dan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat.

Capaian product Jawa Barat juga terlihat dari data kinerja SIPD yang menunjukkan bahwa provinsi ini berada pada kategori baik dengan skor penggunaan SIPD sebesar 94,6. Jawa Barat tidak mengalami keterlambatan APBD dan hanya mencatat jumlah aduan SIPD yang relatif rendah. Selain itu, proses pencairan SP2D juga berjalan lebih lancar tanpa dokumen tertahan dalam jumlah signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa manfaat SIPD di Jawa Barat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Meskipun demikian, capaian product Jawa Barat belum dapat dikatakan sepenuhnya sempurna karena masih terdapat kebutuhan penyempurnaan pada fitur tertentu, terutama dalam mengakomodasi kompleksitas transaksi Badan Layanan Umum Daerah. Namun, kendala tersebut tidak mengurangi kesimpulan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan capaian product paling optimal dalam penelitian ini.

Berbeda dengan Jawa Barat, Provinsi Banten menunjukkan capaian product pada kategori cukup atau moderat. SIPD di Banten telah memberikan manfaat dalam peningkatan transparansi, integrasi data, dan kemudahan akses informasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dasar SIPD telah mulai tercapai, terutama dalam menyediakan sistem yang dapat membantu pemerintah daerah memantau dan mengelola data keuangan secara lebih terbuka. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh pengguna karena masih terdapat persoalan pada konsistensi input data, pemahaman aparatur, dan efektivitas penggunaan sistem. Dengan kata lain, SIPD di Banten telah menghasilkan output positif, tetapi output tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi outcome yang kuat dan merata.

Pada Provinsi Banten, manfaat SIPD masih sangat bergantung pada kualitas input data dari perangkat daerah. Apabila input data belum konsisten, maka laporan atau informasi yang dihasilkan sistem juga belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa product SIPD tidak dapat dipisahkan dari dimensi input dan process. Ketika

kompetensi pengguna belum merata dan proses penggunaan sistem belum sepenuhnya konsisten, maka hasil akhir yang dihasilkan juga belum optimal. Oleh karena itu, capaian product di Banten dapat dikatakan berada pada arah yang benar, tetapi masih membutuhkan penguatan agar manfaat SIPD dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh perangkat daerah.

Capaian product Banten juga tercermin dari skor penggunaan SIPD sebesar 82,43 yang menempatkan provinsi ini dalam kategori moderat. Banten masih mencatat jumlah aduan SIPD yang cukup tinggi dan mengalami keterlambatan APBD selama satu hari. Data tersebut menunjukkan bahwa SIPD telah berjalan dan memberikan manfaat, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan output yang stabil. Manfaat yang muncul berupa transparansi dan integrasi data belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan akuntabilitas yang optimal karena masih terdapat masalah pada konsistensi input dan keseragaman pemahaman pengguna. Dengan demikian, product SIPD di Banten menunjukkan hasil menengah: sudah ada manfaat, tetapi belum maksimal.

Sementara itu, Provinsi Jambi menunjukkan capaian product paling rendah dibandingkan Jawa Barat dan Banten. SIPD di Jambi memang telah memberikan beberapa manfaat awal, terutama dalam keteraturan dokumentasi dan potensi integrasi data keuangan. Namun, manfaat tersebut belum cukup kuat untuk mengimbangi berbagai output negatif yang muncul selama pelaksanaan. Keterlambatan APBD, kendala pada proses SP2D, belum optimalnya modul kas dan pembukuan, serta keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan hasil SIPD di Jambi belum sesuai dengan tujuan awal program. Kondisi ini menunjukkan bahwa SIPD di Jambi masih berada pada tahap adaptasi dan belum sepenuhnya mampu menghasilkan manfaat yang merata dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Rendahnya capaian product di Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem sangat dipengaruhi oleh kesiapan daerah dalam menjalankan prosesnya. Ketika sumber daya manusia belum cukup siap, infrastruktur belum memadai, dan modul sistem belum berjalan sepenuhnya, maka output yang dihasilkan sistem juga belum optimal. Dalam konteks Jambi, SIPD belum sepenuhnya mampu mendukung integrasi data, efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana tujuan awalnya. Bahkan, masih adanya proses manual dan belum optimalnya modul utama dapat menimbulkan pengalaman penggunaan yang kurang baik bagi aparatur. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka potensi resistensi terhadap sistem dapat meningkat karena aparatur menganggap SIPD sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai instrumen yang mempermudah pekerjaan.

Pada indikator kedua, yaitu kesesuaian hasil dengan tujuan program, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian product SIPD berbeda pada tiap provinsi. Di Jawa Barat, hasil SIPD relatif telah sesuai dengan tujuan program karena sistem mampu mendukung transparansi, keteraturan dokumen, efisiensi administrasi, akuntabilitas proses, serta pengambilan keputusan berbasis data. Di Banten, hasil SIPD sudah mengarah pada tujuan program, tetapi belum sepenuhnya optimal karena manfaat sistem masih dipengaruhi oleh kualitas input data dan pemerataan pemahaman pengguna. Adapun di Jambi, hasil SIPD belum sesuai dengan tujuan program secara menyeluruh karena manfaat yang dihasilkan masih terbatas dan belum mampu mengatasi hambatan teknis maupun administratif yang terjadi dalam pelaksanaan.

Jika dibandingkan antarprovinsi, dimensi product menunjukkan bahwa capaian hasil sangat berkaitan dengan dimensi context, input, dan process. Provinsi yang memiliki pemahaman kebijakan yang kuat, sumber daya yang lebih siap, dan proses pelaksanaan yang lebih stabil akan menghasilkan product yang lebih baik. Hal ini terlihat pada Jawa Barat yang mampu menghasilkan output dan outcome lebih optimal karena didukung oleh kesiapan input dan proses yang relatif baik. Sebaliknya, provinsi dengan keterbatasan input dan proses yang belum stabil cenderung menghasilkan product

yang lebih rendah, sebagaimana terlihat pada Jambi. Banten berada di antara keduanya karena telah memperoleh manfaat SIPD, tetapi masih perlu memperkuat konsistensi input dan proses agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Dengan demikian, evaluasi pada dimensi product menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD belum menghasilkan manfaat yang merata pada tingkat provinsi. Jawa Barat menunjukkan capaian product paling optimal karena SIPD telah mendukung transparansi, efisiensi administrasi, keteraturan alur kerja, akuntabilitas, kemudahan monitoring, validitas data, dan budaya kerja berbasis informasi keuangan. Banten menunjukkan capaian menengah karena SIPD telah memberikan manfaat dalam transparansi dan integrasi data, tetapi belum sepenuhnya optimal akibat konsistensi input dan pemerataan pemahaman pengguna yang masih perlu diperkuat. Jambi menunjukkan capaian paling rendah karena manfaat SIPD masih terbatas dan belum mampu mengimbangi kendala teknis, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya modul utama. Oleh karena itu, dimensi product menegaskan bahwa keberhasilan SIPD sebagai sistem nasional sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengubah sistem digital menjadi manfaat nyata bagi tata kelola keuangan daerah.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi di Indonesia belum berjalan optimal secara merata. Meskipun SIPD telah dirancang sebagai sistem nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, realitas pelaksanaannya menunjukkan adanya perbedaan kemampuan antarprovinsi dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik operasional. Provinsi Jawa Barat menunjukkan implementasi yang paling baik karena memiliki pemahaman kebijakan yang lebih kuat, kesiapan sumber daya yang lebih memadai, proses pelaksanaan yang lebih stabil, serta manfaat sistem yang lebih nyata. Sementara itu, Provinsi Banten berada pada kategori moderat karena SIPD telah berjalan tetapi belum konsisten pada seluruh perangkat daerah. Adapun Provinsi Jambi menunjukkan capaian paling rendah karena masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan proses teknis penatausahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan daerah dalam menjalankan sistem tersebut. Pada dimensi context, kebijakan SIPD pada dasarnya relevan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah karena mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integrasi data. Namun, relevansi kebijakan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman dan penerjemahan yang seragam di tingkat daerah. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa implementasi SIPD masih sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, kesiapan aparatur, dan struktur birokrasi, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman terhadap tujuan sistem menjadi dasar penting bagi keberhasilan pelaksanaan SIPD (Balqis et al., 2021; Tumija et al., 2023).

Pada dimensi input dan process, hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketimpangan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan belum bakunya bisnis proses menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan SIPD. Jawa Barat yang memiliki input lebih siap mampu menjalankan proses pelaksanaan dan penatausahaan secara lebih stabil, sedangkan Banten masih menghadapi kendala pada pemerataan pemahaman pengguna dan konsistensi input data. Jambi menunjukkan kondisi yang lebih lemah karena masih ditemukan keterlambatan sinkronisasi, gangguan jaringan, input manual, serta belum optimalnya modul kas dan pembukuan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sistem informasi pemerintahan tidak dapat berjalan efektif apabila

tidak didukung oleh kompetensi aparatur, kesiapan infrastruktur, dan kejelasan alur kerja yang operasional.

Pada dimensi product, penelitian ini menemukan bahwa manfaat SIPD belum dirasakan secara merata. Jawa Barat telah memperoleh manfaat yang lebih nyata berupa peningkatan transparansi, kemudahan monitoring, ketertiban dokumen, efisiensi administrasi, dan akuntabilitas proses keuangan. Banten telah merasakan manfaat SIPD dalam integrasi data dan akses informasi, tetapi manfaat tersebut belum maksimal karena masih dipengaruhi oleh kualitas input dan pemahaman aparatur. Sementara itu, Jambi belum memperoleh hasil yang optimal karena keterbatasan input dan proses menyebabkan manfaat SIPD belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penerapan SIPD memiliki hubungan dengan kualitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan pengguna dan kualitas sistem yang digunakan (Wahyudi et al., 2024; Sinurat & Sari, 2025).

Secara keseluruhan, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa SIPD merupakan instrumen penting dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi keberhasilannya belum dapat digeneralisasikan secara merata pada seluruh provinsi. Perbedaan capaian antara Jawa Barat, Banten, dan Jambi menunjukkan bahwa implementasi sistem nasional tetap membutuhkan penyesuaian terhadap kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kerja masing-masing daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD bukan hanya persoalan penggunaan aplikasi, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membangun sistem kerja yang tertib, terintegrasi, dan berorientasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi di Indonesia belum berjalan optimal secara merata. Melalui model evaluasi CIPP, pelaksanaan SIPD menunjukkan bahwa pada dimensi context, kebijakan SIPD telah relevan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi, namun belum sepenuhnya diterjemahkan secara seragam oleh seluruh provinsi. Pada dimensi input, masih terdapat perbedaan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan sistem antar daerah. Pada dimensi process, pelaksanaan dan penatausahaan melalui SIPD telah berjalan, tetapi belum seluruhnya konsisten karena masih ditemukan perbedaan kualitas proses antarprovinsi. Pada dimensi product, manfaat SIPD telah dirasakan dalam mendukung keteraturan administrasi, integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi capaian tersebut belum merata, dengan Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil paling optimal, Provinsi Banten berada pada kategori moderat, dan Provinsi Jambi masih menunjukkan capaian yang rendah. Dengan demikian, SIPD merupakan instrumen penting dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah, namun efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengoperasionalkan sistem secara konsisten sesuai dengan tujuan kebijakan.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada evaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tingkat provinsi dengan menggunakan

perbandingan tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan Jambi, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan pada seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kondisi infrastruktur yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi SIPD dibandingkan pengukuran secara kuantitatif terhadap tingkat efektivitas sistem. Keterbatasan lainnya terletak pada penggunaan data dan informasi yang bersumber dari dokumen, wawancara, dan observasi dalam periode penelitian tertentu, sehingga dinamika perubahan sistem, pembaruan fitur SIPD, serta kebijakan teknis terbaru yang muncul setelah penelitian dilakukan belum sepenuhnya tercakup dalam pembahasan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini diarahkan pada pengembangan kajian evaluasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak provinsi di Indonesia agar hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai tingkat keberhasilan implementasi SIPD secara nasional. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat efektivitas SIPD secara lebih terukur, misalnya melalui indikator ketepatan waktu penerbitan dokumen keuangan, kecepatan proses pencairan, tingkat kesalahan input, kualitas laporan keuangan, serta kepuasan pengguna sistem. Penelitian berikutnya juga dapat memperdalam kajian pada aspek integrasi sistem, kualitas bisnis proses, kapasitas sumber daya manusia, dan dampak pembaruan fitur SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih komprehensif dan menjadi dasar penguatan kebijakan dalam penyempurnaan implementasi SIPD pada pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, data, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian terkait pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jambi yang telah menjadi bagian penting dalam penyediaan data dan informasi penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, doa, dan bantuan selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, B. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep & Teori*. Jakarta: CV Bumi Metro Raya. ISBN 978-602-17937-3-2. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=278

Balqis, N., Fadhly, Z., & Maulyanda. (2021). Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11*(1), 146–161. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications. ISBN 978-1-0718-7063-1. https://edge.sagepub.com/creswellrd6e

Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Bisogno, M. (2022). Public-sector financial management and e-government: The role played by accounting systems. *International Journal of Public Administration, 45*(8), 605–619. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1868506

Fitriani, L., & Solikhin, A. (2025). Pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh teknologi informasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 13*(5), 1548–1561. https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328

Jin, P., & Wang, Z. (2025). Digital budget supervision governance and local government fiscal transparency. *International Review of Economics & Finance, 102*, 104306. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104306

Kassen, M. (2022). Blockchain and e-government innovation: Automation of public information processes. *Information Systems, 103*, 101862. https://doi.org/10.1016/j.is.2021.101862

Mandasari, L., & Endasari, E. (2024). Evaluasi penerapan aplikasi E-Sumsel dalam pembayaran perjalanan dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50*(2), 163–172. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/4293

Meynaldi, R., & Rosalina, R. R. (2024). Analisis peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) penatausahaan terhadap media pelaporan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6*(3), 1524–1536. https://www.semanticscholar.org/reader/d2f0d3bcf7e2a2e35b3494b0d8050b267e292400

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications. ISBN 978-1-4522-5787-7.

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9*(2), 109–116. https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. ISBN 978-623-90984-3-8. https://eprints.ipdn.ac.id/4510/

Pakpahan, R. T. (2024). Evaluating implementation of e-government public services in DKI Jakarta towards a smart city using the CIPP and Kirkpatrick evaluation model. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences, 4*(1), 88–99. https://doi.org/10.32509/mirshus.v4i1.86

Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 16*(2), 195–209. https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4809

Rezkiaty, A. H., Alam, S., & Tenriwaru. (2024). Evaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. *SEIKO: Journal of Management & Business, 7*(2), 464–478. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/7178

Ridwan, & Baso, N. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-289-319-6. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=2991

Sadik-Zada, E. R., Gatto, A., & Niftiyev, I. (2024). E-government and petty corruption in public sector service delivery. *Technology Analysis & Strategic Management, 36*(12), 3987–4003. https://doi.org/10.1080/09537325.2022.2067037

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif* (Cet. 3). Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-289-284-7. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=776

Sinurat, M., & Sari, N. L. G. G. P. P. (2025). Eksplorasi praktik pelaporan keuangan daerah: Perspektif aparatur terhadap literasi akuntansi dan Sistem Informasi Pemerintahan: Studi kasus laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 12*(1), 16–27. https://doi.org/10.33701/jekp.v12i1.5482

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 978-0-7879-7765-8.

Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal, 8*(1), 15–22. https://doi.org/10.22225/wedj.8.1.2025.15-22

Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi, 5*(2), 155–169. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696

Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi, 5*(1), 79–91. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/3389

Tumija, T., & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10*(2). https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528

Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024). Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11*(1), 27–38. https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381

Zahroh, M., Susarno, L. H., & Bachri, B. S. (2025). The CIPP model in training program evaluation: How effective is it? *Journal of Educational Technology Studies and Applied Research, 2*(2). https://journal.teknologipendidikan.or.id/index.php/jetsar/article/view/58